BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ekonomi Pembangunan

1. Pengertian Ekonomi Pembangunan

Ekonomi adalah suatu tingkah laku seseorang baik secara individu maupun kelompok untuk penggunaan faktor-faktor yang dibutuhkan. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Meliputi kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Pemenuhan kebutuhan dengan kendala keterbatasan sumber daya yang ada sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.[1]

Pembangunan merupakan langkah yang ditempuh oleh suatu negara untuk melakukan perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh guna memperoleh kemajuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Ilmu dari ekonomi pembangunan memfokuskan pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang. Selain itu dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga

[1] Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 24.

Sumber Daya Alam (SDA) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.[2]

Semenjak adanya suatu ketimpangan pada perkembangan ekonomi pada negara maju dengan negara berkembang, ekonomi pembangunan dinilai sangat penting untuk diterapkan disuatu negara yang terbelakang. Dari paparan penjelasan di atas, ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat guna memenuhi segala kebutuhannya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran.

2. Komponen Ekonomi Pembangunan

Komponen pokok ekonomi pembangunan terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, permodalan, kemiskinan, pengerahan tabungan dan beberapa bantuan dari negara asing atau luar negeri. Adapun bidang-bidang dalam kajian ekonomi pembangunan antara lain:[3]

a. Pertumbuhan ekonomi
b. Industrialisasi dan perdagangan
c. Hubungan antara negara kaya dengan negara miskin
d. Stabilitas dan penyesuaian struktur
e. Perkembangan ekonomi
f. Pertumbuhan jumlah penduduk
g. Strategi dan tujuan dari pembangunan

[2] Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 6
[3] Taryono, *Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan*, MMPI5204/Modul 1. hlm. 1.

3. Azas-azas Pembangunan

Dalam penerapannya pembangunan dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu:[4]

a. Azas pembangunan integral

Diartikan bahwa pembangunan yang seimbang mencakup segi-segi masyarakat yang meliputi berbagai bidang, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dll. Sehingga dapat menjamin suatu perkembangan yang selaras dan tidak tumpang tindih. Namun perlu diingat bahwa untuk masa permulaan fokus utamanya harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

b. Azas kekuatan sendiri

Merupakan pembangunan yang setiap usaha pertamanya didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah.

c. Azas permufakatan bersama

Merupakan usaha pembangunan yang harus dilaksanakan secara langsung di lapangan dan benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan putusan untuk melaksanakan proyek itu bukan berdasarkan atas perintah atasan, melainkan merupakan putusan bersama anggota masyarakat desa.

---

[4] Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 36.

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi artinya pelaksanaan atau penerapan.[5] Implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan dari rencana yang telah dibuat sebelumnya secara seksama dan terperinci. Implementasi biasanya diterapkan pada saat perencanaan yang dibuat sudah dianggap sempurna. Nurdin Usman berpendapat bahwa, suatu implementasi itu bermuara pada aksi atau mekanisme sistem yang tidak hanya sekedar aktivitas, namun berupa kegiatan yang tersusun secara sistematis demi tercapainya suatu tujuan.[6] Guntur Setiawan menjelaskan bahwa implementasi berupa aktivitas yang saling mengaitkan antara tujuan maupun tindakan.[7]

2. Tujuan Implementasi

Proses implementasi akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, serta program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan. Implementasi memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun
b. Mewujudkan tujuan-tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rencana
c. Menilai kemampuan masyarakat terhadap suatu kebijakan
d. Mengetahui keberhasilan kegiatan yang dijalankan
e. Bahan evaluasi dan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya.

---

[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* dalam http://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada hari Kamis tanggal 22 November 2019 pada pukul 08.55 WIB.

[6] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

[7] Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

C. Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra)

1. Pengertian Program Jalin Matra

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) serta dalam upaya untuk menumbuhkembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur 2014-2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA).

Jalin Matra atau biasa disebut Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera, merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi RTS yang belum beruntung berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015 dengan memperhatikan data PPFM 2018 dengan status kesejahteraan 30% terendah. [8]

Desil adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Dalam Program Jalin Matra menyasar masyarakat pada desil 1, desil 2 dan desil 3.

a. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 1-10% terendah
b. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 10-20% terendah
c. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok 20-30% terendah[9]

[8] Buku Pedoman Jalin Matra……, hlm. 5.
[9] BDT (Basis Data Terpadu) Untuk Perlindungan Sosial, hlm 8.

2. Kegiatan Program Jalin Matra

Dalam pelaksanaannya Program Jalin Matra memiliki tiga kegiatan unggulan sebagai berikut:

a. BRTSM atau Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin, adalah program Jalin Matra yang menyasar pada masyarakat yang sangat miskin, dengan tingkat kesejahteraan 1-5% terendah (desil 1)

b. PFK atau Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, adalah program Jalin Matra yang menyasar pada masyarakat miskin dengan kepala rumah tangga perempuan, yang memiliki tingkat kesejahteraan 1-10% terendah (desil 1)

c. PK2 atau Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan, adalah program Jalin Matra yang menyasar pada masyarakat hampir miskin yang berpotensi/sudah memiliki usaha, dengan tingkat kesejahteraan 11-30% terendah (desil 2 dan 3).[10]

Berikut Jumlah Penerima Program Jalin Matra Kabupaten Tulungagung :

Tabel 2.1
Jumlah Penerima Program Jalin Matra Kabupaten Tulungagung

Tahun	RTS	Jumlah
2014	261	783.000.000
2015	522	1.336.600.000
2016	460	1.102.500.000
2017	2.014	5.260.500.000
2018	1.661	4.463.000.000
2019	716	2.356.375.000
Total	4.918	15.301.975.000

Sumber: Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung

[10] Buku Pedoman Jalin Matra……, hlm. 6.

D. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2)

1. Pengertian Jalin Matra PK2

Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) merupakan program yang secara khusus menargetkan sasarannya terhadap kelompok RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang tergolong desil 2 dan 3 atau kelompok masyarakat yang berada dalam kategori hampir miskin.[11] Masyarakat yang tergolong desil 2 dan desil 3 dapat didefinisikan sebagai masyarakat rumah tangga yang dalam kesehariannya sebenarnya relatif cukup mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, namun apabila ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, mereka akan mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan, dikhawatirkan masyarakat tersebut semakin parah tingkat kemiskinannya.

2. Tujuan Jalin Matra PK2

a. Tujuan Umum

Tujuan umum Jalin Matra PK2 yaitu membantu supaya masyarakat rentan miskin yang telah berada pada desil 2 dan desil 3 tidak akan terperosok pada desil 1.

b. Tujuan khusus Jalin Matra PK2 adalah:

1) Memberikan dorongan RTS yang rentan miskin supaya bisa mengatasi kerentanan yang dihadapinya sesuai dengan potensi lokal di desanya masing-masing

[11] *Ibid*., hlm. 6.

2) Memberikan dorongan agar mampu mengembangkan usahanya yang lebih produktif sesuai dengan potensi lokal di desanya masing-masing

3) Mendorong tumbuh serta berkembangnya usaha BUMDesa agar pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi.[12]

3. Rumah Tangga Sasaran Jalin Matra PK2

Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak menerima bantuan PK2 antara lain:[13]

a. RTS yang tergolong pada kategori rumah tangga rentan pada desil 2 dan 3

b. RTS calon penerima bantuan PK2 harus berusia produktif, yaitu usia antara 15-65 tahun

c. Diutamakan RTS calon penerima bantuan PK2 memiliki potensi melakukan usaha produktif, yaitu RTS yang telah memiliki usaha produktif, maupun RTS yang memiliki rencana untuk melakukan usaha produktif

d. RTS yang sesuai kualifikasi tersebut untuk membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dengan ketentuan jumlah anggotanya sebanyak 5 s/d 10 rumah tangga, baik yang memiliki potensi usaha sejenis ataupun tidak sejenis, dan juga berdekatan tempat tinggalnya.

---

[12] http://bapemas.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2, diakses pada 30 Agustus 2019
[13] Buku Pedoman Jalin Matra……, hlm. 10-11.

4. Kriteria Lokasi Jalin Matra PK2

Lokasi penerima bantuan PK2 adalah desa-desa yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan kriteria sebagai berikut:[14]

a. Desa harus mempunyai RTS yang tergolong kategori desil 2 dan 3 paling sedikit 100 rumah tangga
b. Desa mempunyai potensi SDA yang dapat dikembangkan untuk kegiatan usaha produktif
c. Desa harus mempunyai Profil Desa dan juga telah melakukan *entry* data pada *website* Profil Desa
d. Mempunyai BUMDesa serta usaha pada BUMDesa harus telah berjalan.

5. Prinsip Dasar Jalin Matra PK2

Adapun prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaan program Jalin Matra PK2 antara lain:[15]

a. Membangun dengan hati

Pada dasarnya program Jalin Matra PK2 merupakan sebuah implementasi terhadap kewajiban suatu negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rumah tangga miskin agar dapat bertahan hidup dan mencukupi segala kebutuhannya. Maka dari itu Jalin Matra PK2 harus dilaksanakan dengan sepenuh hati untuk membatu sesama.

[14] *Ibid*., hlm. 11.
[15] *Ibid*., hlm. 11-13.

b. *Participatory*

Pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama dengan warga untuk membahas kebutuhan yang mereka butuhkan, serta melakukan rembug warga untuk mengkaji kelayakan usaha yang sesuai dengan potensi lokal pada masing-masing desa.

c. Transparan dan Akuntabel

Program ini harus dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat sekitar maupun pihak yang berkepentingan. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, monitoring, dan evaluasi. Selain itu pelaksanaan kegiatan harus melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik dalam memberikan kritik maupun saran

d. Keterpaduan

Program Jalin Matra PK2 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), aparatur pemerintah, perguruan tinggi penamping, tenaga pendamping kabupaten maupun desa, serta masyarakat yang aktif berperan dan berkontribusi.

e. Keberlanjutan

Program Jalin Matra PK2 merupakan stimulus ekonomi dan sosial yang perlu untuk dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh RTS, BUMDesa dan Pemerintah Desa. Hal ini dimaksudkan

agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat melalui dana pinjaman sebagai modal usaha produktif.

6. Ruang Lingkup Jalin Matra PK2

Ruang lingkup pelaksanaan program Jalin Matra PK2 adalah sebagai berikut:[16]

a. Klarifikasi dan klasifikasi RTS

Klarifikasi suatu kegiatan untuk memastikan keberadaan RTS sesuai kondisi lapangan, sedangkan klasifikasi adalah pengelompokkan RTS hasil klarifikasi kedalam kelompok RTS produktif dan RTS non produktif.

b. Verifikasi dan penilaian kelayakan usaha

Verifikasi merupakan kegiatan pengecekan rencana usaha dengan kondisi pokmas dilapangan secara aktual dan faktual dengan melakukan kunjungan secara langsung ke lapangan ke tempat usaha, yang dilakukan oleh pendamping kabupaten bersama dengan pengelola BUMDesa dan pendamping desa.

c. Pemberian pinjaman murah

Dana pinjaman yang diberikan oleh BUMDesa ditujukan sebagai modal usaha atau tambahan modal usaha ekonomi produktif guna meningkatkan pendapatan mereka.

[16] *Ibid*., hlm. 13-17.

d. Peningkatan kapasitas RTS

Dilakukan melalui penyuluhan, bimtek, pelatihan, magang, dll. Peningkatan kapasitas ini dapat berupa pengembangan teknologi, fasilitasi pemasaran, dan manajemen usaha serta terjalinnya relasi antar RTS.

e. Pengembangan BUMDesa

Sebagai upaya untuk memberi motivasi, bimbingan, dan pengembangan keberlanjutan BUMDesa. Hal ini dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

1) Peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDesa
2) Peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDesa dan unit-unit usahanya
3) Peningkatan kinerja keuangan dan pengembangan sistem keterjaminan sosial melalui BUMDesa
4) Pengembangan permodalan, kualitas produk dan akses pemasaran.

f. Pendampingan program

Sebagai fasilitas pengembangan BUMDesa yang telah berjalan dan sebagai tolak ukur ketepatan sasaran bantuan PK2 yang telah dilaksanakan.

7. Mekanisme Pelaksanaan Jalin Matra PK2

Pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 secara umum terdiri dari beberapa tahap, sebagai berikut:[17]

a. Sosialisasi di Provinsi, bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan Jalin Matra PK2, dihadiri oleh dinas atau instansi provinsi dan kabupaten terkait.
b. Sosialisasi di Kabupaten, setelah kegiatan sosialisasi di provinsi, selanjutnya diadakan kegiatan sosialisasi di kabupaten guna memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jalin Matra PK2 dan menjalin komitmen dari berbagai dinas atau instansi terkait. Sosialisasi ini diikuti oleh beberapan unsur seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung (DPMD), Camat, Kepala Desa, Pendamping Kabupaten, dan lainnya.
c. Pra Rembug Warga, pertemuan khusus yang diadakan sebelum rembug warga. Dihadiri oleh Pendamping Kabupaten, tim fasilitasi kecamatan, Kepala Desa, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Pengurus BUMDesa. Agenda pertemuan tersebut adalah membahas penjaringan calon pendamping desa, menjaring rencana usaha BUMDesa, menentukan pelaksanaan kegiatan rembug warga.
d. Rembug Warga, kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yang bertujuan menjelaskan kepada stakeholder tentang kegiatan

[17] *Ibid*., hlm. 45-69.

Jalin Matra PK2 dan memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Jalin Matra PK2 telah dianggarkan dalam APBD, pemilihan dan penetapan pendamping desa, menyepakati hasil identifikasi usulan kebutuhan usaha BUMDesa.

e. Identifikasi Potensi Desa, dilakukan oleh BUMDesa dan pendamping desa dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan. Hasil identifikasi potensi desa dimaksudkan sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan pinjaman murah Jalin Matra PK2 kepada calon RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima bantuan.

f. Klarifikasi dan Klasifikasi RTS, klarifikasi adalah kegiatan untuk memastikan keberadaan RTS sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan klasifikasi adalah kegiatan untuk mengelompokkan RTS hasil klarifikasi kedalam RTS Produktif dan RTS non Produktif. Selanjutnya RTS produktif diklasifikasikan lagi menjadi RTS produktif yang telah memiliki usaha, berpotensi memiliki usaha dan yang tidak memiliki potensi usaha. RTS yang menjadi sasaran Jalin Matra PK2 adalah RTS produktif yang memiliki usaha dan atau berpotensi memiliki usaha.

g. Pembentukan Kelompok Masyarakat, pembentukan kelompok ini bisa dilakukan berdasarkan rencana usaha produktif yang sejenis, atau bisa dilakukan berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Setiap kelompok terdiri dari 5-10 rumah tangga. Tujuan pembentukan kelompok masyarakat atau biasa disebut pokmas ini agar dalam

pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PK2 dapat lebih mudah untuk dipantau dan diarahkan.

h. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha Pokmas, bertujuan untuk memberikan motivasi usaha kepada RTS dan penjelasan mengenai optimalisasi pemanfaatan dana pinjaman murah Jalin Matra PK2 untuk modal usaha, mekanisme penggunaan dana pinjaman dengan sistem perguliran, tata cara angsuran, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman untuk rencana usaha pokmas.

i. Verifikasi RTS dan Penilaian Kelayakan Usaha RTS, verifikasi RTS adalah kegiatan pengecekan secara langsung rencana usaha pokmas berdasarkan kondisi di lapangan. Sedangkan penilaian kelayakan usaha RTS adalah kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap rencana usaha pokmas yang diajukan kepada BUMDesa untuk memperoleh pinjaman murah dana Jalin Matra PK2.

j. Penilaian Kelayakan Usaha BUMDesa, merupakan kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap unit-unit usaha yang layak untuk didanai oleh Jalin Matra PK2.

k. Pengajuan Pencairan Dana, pengajuan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

l. Realisasi Pinjaman, ketua dan bendahara BUMDesa melakukan pencairan pinjaman kepada pokmas dengan diketahui oleh Kepala

Desa, Pendamping Kabupaten, Pendamping Desa. Pendamping Kabupaten dan Pendamping Desa bersama pengurus BUMDesa melakukan kunjungan dan pemantauan pada setiap RTS untuk memastikan bahwa dana pinjaman yang telah diberikan sudah direalisasikan sesuai dengan rencana usaha.

m. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pinjaman, dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, dan fasilitasi teknis pengelolaan usaha kepada pokmas penerima bantuan Jalin Matra PK2 agar mereka dapat memanfaatkan pinjaman secara efektif dan dapat mengembangkan usahanya.

n. Pertanggungjawaban, dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab atas pelaksanaan program Jalin Matra PK2, dan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

o. Pengelolaan dan Pelestarian Program, yaitu pengawasan, pembinaan dan pelestarian pasca program Jalin Matra PK2 diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan desa melalui BUMdesa agar perguliran dana tetap berjalan sebagai program penanggulangan kemiskinan.

8. Indikator Keberhasilan Jalin Matra PK2

Keberhasilan pelaksanaan program PK2 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:[18]

a. Tepat Sasaran, sesuai dengan Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2018 pada desil 2 dan 3, serta dilakukan klarifikasi, klasifikasi, verifikasi, dan kelayakan usaha.
b. Tingkat Pengembalian Pinjaman, RTS wajib mengembalikan dana pinjaman kepada BUMDesa dengan mekanisme yang telah disepakati.
c. Peningkatan Pendapatan, bantuan pinjaman PK2 diharapkan mampu meningkatkan penghasilan perekonomian warga
d. Pengembangan Usaha BUMDesa
e. Tepat Administrasi, berkas pencairan dan laporan pertanggungjawaban harus tepat sesuai Pedoman Umum dan PTO (Petunjuk Teknis Operasional).

E. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah akar kata dari daya atau power.[19] Pemberdayaan juga dimaksudkan sebagai tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya", yang artinya kekuatan atau kemampuan, sehingga

[18] *Ibid*., hlm. 23-24.
[19] Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 1.

memiliki arti pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang tak berdaya. Pengertian "proses" merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara vertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *praticipe* menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap, perilaku sadar dan kecakapan-kecakapan yang baik.[20]

Selain itu pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang telah dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Prasojo mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu rangkaian yang sistematis dengan melibatkan berbagai komponen organisasi formal maupun non formal. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan untuk menghimpun dan menyatukan kemampuan masyarakat dengan lingkungannya. Oleh karena itu perlu adanya gerakan dari masyarakat langsung dan juga pemerintah yang berupa anggaran negara atau daerah. Selanjutnya Prasojo juga menyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan apabila tidak disertai dengan sumber kewenangan,

[20] Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 77.

manajemen, program dan pembiayaan yang ada. Pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan bantuan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas.[21]

Pemberdayaan ekonomi merupakan program orientasi pemberdayaan masyarakat secara penuh agar dapat terentaskan dari kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.[22]

2. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari tujuh tahapan, diantaranya sebagai berikut:[23]

a. Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Persiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan peyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan

[21] Prasojo, People and Society Empowerment: Prespektif Membangun Partisipasi Publik, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2004, hlm. 10.

[22] Muhammad Hasan, *Pembangunan ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Makasar: CV. Nur Lina, 2018), hlm. 161.

[23] Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Baru, 2012), hlm. 35-37.

kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

b. Tahap assessment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidetifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukan.

d. Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan ke pihak penyandang dana.

e. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan peran dari masyarakat dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng dengan data di lapangan.

f. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama fasilitator.

g. Tahap terminasi. Pada tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi seharusnya dilakukan jika masyarakat sasaran sudah bisa mandiri, bukan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, keberhasilan program pemberdayaan bisa dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:[24]

a. Jumlah penduduk miskin berkurang

b. Berkembangnya suatu usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

c. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar

d. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya

[24] Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*, (Bandung: UNPAD Press, 2016), hlm. 16.

e. Meningkatnya kemandirian yang ditandai dengan usaha produktif semakin berkembang, permodalan semakin kuat, sistem administrasi semakin rapi, serta semakin luasnya interaksi di dalam masyarakat.

F. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Secara bahasa ekonomi keluarga terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan keluarga. Ekonomi merupakan ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta menggunakan barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga kebutuhan dalam masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Ekonomi juga diartikan sebagai tingkah laku manusia secara individu maupun bersama-sama dalam menggunakan faktor-faktor yang mereka butuhkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui 3 kegiatan yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Atau bisa dikatakan bahwa kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.[25]

Keluarga adalah suatu satuan kekerabatan dan juga satuan tempat yang ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi serta mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau membidik anak dan tolong-menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang

[25] M. Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

tua yang sudah lanjut usia. Secara sederhana keluarga dapat digambarkan dengan adanya seorang laki-laki dan perempuan ditambah dengan anak-anak yang tinggal dalam satu atap yang sama.

Ekonomi keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu kajian tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui berbagai aktivitas yang telah dilakukan dengan bertanggungjawab atas kebutuhan maupun kebahagiaannya.

2. Aspek-aspek Ekonomi Keluarga

Status sosial pada ekonomi keluarga dalam masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya. Dalam konteks ini Soerjono Soekanto mengutip keterangan Aris Toteles "Bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsure, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya".[26]

Dari penjelasan di atas, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat tiga lapisan ekonomi yang berbeda, antara lain:

a. Ekonomi Keluarga Mampu

Marx mengatakan bahwa "Selama masyarakat masih terbagi kedalam kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah yang akan terhimpun segala kekuasaan dan kekayaannya." Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat

[26] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990), hlm. 251.

kedalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan.[27]

Ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanahlah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah dianggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atasan masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari dinamakan elit. Dan biasanya lapisan golongan atasan merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini, dan hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar.[28]

b. Ekonomi Keluarga Sedang

Status ekonomi yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup ditengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, dalam golongan ini seseorang tidak hidup berlebihan dalam membelanjakan hartanya dan juga tidak kekurangan dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Lapisan masyarakat ini dapat berkomunikasi baik dengan lapisan di atasnya maupun bawahnya. Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan status di atasnya, karena

[27] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*..... hlm. 263
[28] *Ibid*., hlm. 264.

status ini terlalu banyak dalam masyarakat. Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuhan seperti kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang membedakan adalah tingkat fasilitas yang digunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi yang di atasnya.

c. Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Pada status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga pemukiman masyarakat yang tertinggal. Kelompok masyarakat paa lapisan ini bisa dibilang kaum lemah atau tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

3. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan public yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedangkan pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.[29]

[29] Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan,* (Jakarta: Seketariat Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002)

Pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya bagi masyarakat desa merupakan salah satu cara guna meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat / rumah tangga yang membutuhkan, hal ini bisa dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa, pembenahan lingkungan dan perumahan, pengembangan LKD / Lembaga Keuangan Desa, serta berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menaikkan hasil produksinya.[30]

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau RTS (Rumah Tangga Sasaran) terutama di bidang ekonomi. Untuk itu dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga hendaknya harus direncanakan secara bersama-sama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

[30] Tempoh, "Peranan Hukum Tua dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2013, hlm. 5.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bernardus Seran Kehik, [31] bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang ekonomi kemasyarakatan khususnya di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat terutama di bidang ekonomi. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi sebagai program meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Zusmelia, Dasrizal, Yeni Erita dan Rinel Fitlayeni,[32] bertujuan untuk mengetahui alasan perempuan ikut berdagang di pasar nagari, selain itu juga bagaimana keterkaitan dengan lahirnya jiwa *enterpreneurship* dan keterkaitan jiwa *enterpreneurship* dengan pemberdayaan ekonomi wilayah Sumatra Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model jiwa *enterpreneurship* dimulai dari usaha kecil

---

[31] Bernardus Seran Kehik, "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)", *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2018, hlm. 6.

[32] Zusmelia et.all., "Model Pengembangan *Enterpreneurship* dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Minangkabau", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 28 No. 2, Desember 2012, hlm 125.

yang dilakukan oleh individual (*one man enterprise*) kemudian melibatkan keluarga (*family enterprise*), berkembang menjadi perusahaan berskala kecil (*small scale enterprise*), usaha berskala menengah (*medium scale enterprise*), dan perusahaan besar (*big scale enterprise*). Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan sama-sama mengkaji tentang pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai program pemberdayaan ekonomi keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Yohanis,[33] bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pengembangan kedelai di Kabupaten Keerom sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat dengan lima pendekatan, yaitu analisis permintaan dan penawaran, produktivitas, usaha tani, dan pemasaran dalam melakukan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tani kedelai lokal layak untuk diusahakan dan memberikan keuntungan secara finansial di Kabupaten Keerom. Produktivitas kedelai yang tinggi dan pendapatan petani yang cukup baik memungkinkan dikembangkannya strategi peningkatan produksi. Ancaman yang harus segera ditangani adalah mudahnya kedelai impor yang masuk ke pasar-pasar serta harga pupuk yang fluktuatif dan cenderung naik. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan sama-sama mengkaji pentingnya pengembangan usaha di

[33] Yohanis Rante, "Strategi Pengembangan Tanaman Kedelai Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan,* Vol. 15 No. 1, Maret 2013, hlm 75.

masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus pemberdayaannya hanya pada usaha kedelai saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Cendriono, Titin Eka Ardiana, dan Wahna Widhianingrum,[34] bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 yang meliputi: (1) Pelatihan akuntasi kepada BUMDesa Kaibon sebagai pengelola dana bantuan Jalin Matra PK2, (2) Pelatihan wirausaha terhadap penerima pinjaman PK2 di Desa Kaibon, (3) Penyampaian teknik pemasaran usaha penerima pinjaman program PK2 di Desa Kaibon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya pelatihan akuntansi dan kewirausahaan bagi anggota BUMDesa dan penerima bantuan PK2 dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah serta usaha masyarakat dapat berjalan lancar. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas pemberdayaan usaha bagi masyarakat. Sedangkan perbedaannya fokus penelitian ini adalah pelatihan akuntansi bagi BUMDesa sebagai pengelola dana pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudiantoro Tri Kurniawan,[35] bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Jalin Matra PK2 di Desa Ngroto dan dampaknya, selanjutnya dirancang strategi utnk mengoptimalkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan

[34] Nanang Cendriono et.all., "Pelatihan Akuntansi dan Wirausaha Pengelolaan Bantuan dan Penerima Bantuan Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", *Jurnal Terapan Abdimas*, Vol. 3 No. 1, Januari 2018, hlm. 14-18.

[35] Yudiantoro Tri Kurniawan, " Strategi Optimalisasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Studi Kasus Program Jalin Matra PK2 di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)", *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 98.

kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan program tersebut perlu adanya bantuan untuk penguatan permodalan, tekhnologi, informasi perdagangan, manajemen usaha dan bantuan jaringan profesional. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang bantuan Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan PK2 sebagai upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan fokusnya lebih ke strategi pengoptimalan program saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang,[36] bertujuan untuk mengetahui pentingnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto dalam pemberdayaan masyarakat dengan merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanakan. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Persamaan penelitian ini terletak pada metoe penelitian dan sama-sama meneliti pemberdayaan ekonomi yang

[36] Bambang Supriyono, et.all., "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I, No. 4, hlm. 9-14.

dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tidak memfokuskan pada program Jalin Matra PK2.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardi dan Zulkarnaini,[37] bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program yang berasal dari bantuan keuangan dari pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan berdasarkan sub indikator tahap persiapan program cukup maksimal dilaksanakan. Faktor yang menghambat, yaitu faktor sosialisasi, faktor fasilitas pendukung. Dampak pelaksanaan program cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama meneliti terkait program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa bantuan keuangan. Sedangkan perdedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini khusus membahas bantuan pemerintah berupa pinjaman PK2.

Penelitian yang dilakukan oleh Lifa Indri Astuti, Hermawan dan Mochammad Rozikin,[38] bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah deskriptif

[37] Mardi dan Zulkarnaini, "Program Bantuan Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol.2 No. 2 Maret 2014, hlm. 115.

[38] Lifa Indri Astuti, et.all., "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 11, hlm. 1886-1892.

dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan dengan tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, keahlian dan kekuatan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki. Dukungan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan pertanian berkelanjutan belum maksimal. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pemberdayaan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan hanya berfokus pada pembangunan pertanian saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman,[39] bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dan BUMDesa dalam melaksanakan Program Jalin matra. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen strategi yang digunakan meliputi tiga indikator antara lain formulasi strategi, implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Secara keseluruhan hasil yang diperoleh adalah bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sudah menerapkan program Jalin Matra PK2 dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wringinpitu. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pelaksanaan program Jalin Matra PK2 dalam meningkatkan

[39] Nyoman Putri Novitasari dan Meirinawati, "Manajemen Strategi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang", *Jurnal Publika*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2019, hlm. 1.

kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah,[40] bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam memberayaan desa di Desa Sumberpasir. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui pengaktifan kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat dengan berbagai kegiatan, peningkatan ekonomi produktif. Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

[40] Ita Ulumiyah,et.all, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik,* Vol. 1 No. 5, hlm. 890-899.

H. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

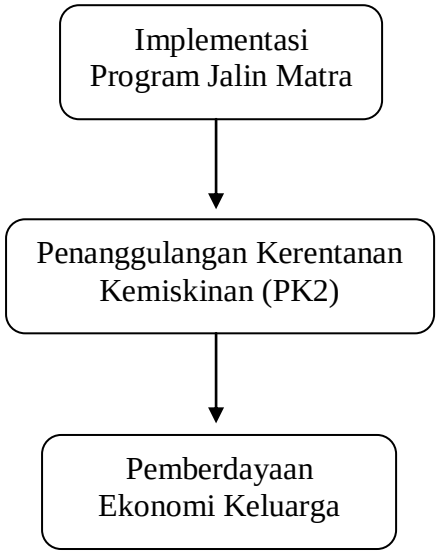

Keterangan:

Implementasi Program Jalin Matra melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) apabila dilakukan dengan prosedur yang tepat dapat membantu pemberdayaan ekonomi keluarga di desa berjalan dengan lancar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.